

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR DALAM UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2015/2016 DI SMP N 1 SEMIN

(THE IMPLEMENTATION OF POLICIES INDONESIA SMART CARD IN AN EFFORT TO AN EQUITABLE DISTRIBUTION OF AN EDUCATION LESSONS YEAR 2015 / 2016 IN SMP N 1 SEMIN)

Oleh: Rini Septiani Astuti, Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Program Studi Kebijakan Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta,
e-mail: rinizaka@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam upaya pemerataan pendidikan dilihat dari implementasi KIP, kriteria penerima, strategi pelaksanaan serta faktor pendukung dan penghambat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ini adalah staf bidang Pendidikan Lanjutan Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, Kepala Sekolah dan Guru BK SMP N 1 Semin, empat orang siswa penerima KIP, serta empat orang tua siswa penerima KIP. Objek penelitian mengenai implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan tahun ajaran 2015/ 2016 di SMP N 1 Semin. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi data. Data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran KIP di SMP N 1 Semin adalah siswa yang memiliki kartu KIP sebanyak 161 siswa. Hasil dari pelaksanaan KIP dapat mendukung upaya pemerataan pendidikan, hal ini ditandai dengan siswa yang menerima dana KIP memenuhi kriteria kondisi keluarga siswa yang ditentukan dari kepemilikan KPS sehingga siswa yang tidak sekolah atau pendidikannya terhalang biaya dapat bersekolah serta terwujudnya pendidikan yang merata. Faktor pendukung implementasi KIP: informasi dari pihak dinas secara rutin ke sekolah dan secara online, Dapodik digunakan pemerintah sebagai salah satu indikator penentuan sasaran penerima KIP, adanya rasa saling percaya antara pihak sekolah dengan siswa beserta orang tua terhadap penggunaan dana KIP, siswa menjadi lebih aktif karena peralatan sekolah dapat terpenuhi. Faktor penghambat: evaluasi program KIP yang dilaksanakan pada setiap periode program menyebabkan terjadinya perubahan khususnya pada mekanismenya, Penyelewengan dana KIP, kesulitan mengumpulkan kuitansi atau bukti penggunaan dana KIP.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Kartu Indonesia Pintar

Abstract

This study attempts to describe the implementation of policies Indonesia Smart Card (KIP) in an effort to an equitable distribution of an education seen from the implementation of KIP,criteria recipients,strategy of the implementation as well as supporters and inhibitors.

This research method used qualitative descriptive. The subject of this study is the staff of junior high school from Gunungkidul district education office, the school principal and counseling teacher of SMP N 1 semin, four people of students who received the KIP, and four parents of students who received the KIP. The object of this research is an implementation policy Indonesia Smart Card in an effort to even distribution of education the school year 2015/2016 in SMP N 1 semin. Data was gathered through a method of observation,interviews and documentation. The validity of the data done by means of triangulation of data.

The results showed that the target KIP in SMP N 1 Semin is a student who has a card KIP many as 161 students. The results of the implementation of the KIP can support the efforts of educational equity, it is marked by students who receive funding KIP has fulfill the criteria specified

conditions of the student's family of proprietary KPS so that students who do not attend school or hindered their education costs can go to school and created equality of education. Supporting factors the implementation KIP: information from the educational office to school and online, Dapodik used by the government as one indicator of the determination of beneficiaries KIP, the trust between the school and the students and parents on the use of funds KIP, students become more active because of school supplies can be sufficient. Inhibiting factors: KIP program evaluation to be conducted every period of the program leads to changes in particular to the mechanism, Diversion KIP funds, difficulty gathering receipts or evidence of the use of funds KIP.

Keywords: Implementation, Policy, Indonesia Smart Card

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan aspek penting yang dianggap sangat menentukan tingkat kemampuan seseorang dalam menghadapi kehidupan. Melalui pendidikan yang mencukupi, kita dapat hidup dengan layak seperti yang diharapkan. Tentunya harapan manusia dimasa yang akan datang adalah hal yang baik, yaitu keadaan dimana kehidupan kita lebih baik dari keadaan sekarang. Penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pencerahan dan sekaligus perubahan pola hidup kepada peserta didik. Mohammad Saroni (2013: 9) menyatakan bahwa pencerahan diperlukan sebagai satu usaha sadar untuk menjadikan kita sebagai sosok penting dalam kehidupan dan perubahan yang dimaksud adalah untuk mempersiapkan kita sebagai sosok yang mampu menghadapi setiap perubahan dalam kehidupan.

Pemerintah Indonesia secara formal telah mengupayakan pemerataan pendidikan mulai dari Sekolah Dasar

hingga Sekolah Menengah, dilanjutkan dengan wajib belajar pendidikan sembilan tahun. Upaya-upaya ini nampaknya lebih mengacu pada perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pemerataan pendidikan dilakukan dengan mengupayakan agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan tanpa mengenalusia, waktu, tempat mereka tinggal yakni baik di kota maupun desa tetap sama.

Kesempatan warga miskin untuk mendapatkan pendidikan pun nampaknya masih belum merata. Hadi Supeno (1999: 11) menyatakan bahwa pendidikan yang dulunya begitu mulia, yakni melepaskan rakyat dari cengkeraman kemelaratan, kini telah menjadi alat dari sistem masyarakat kapitalis. Pendidikan hanyalah milik mereka yang berduit, dan mereka yang berasal dari kelas menengah dan atas. Pendidikan telah menjadi barang mewah, dengan harga yang begitu mahal. Upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar

memperoleh layanan pendidikan yaitu salah satunya melalui program Kartu Indonesia Pintar. Program tersebut diharapkan dapat membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak. Kebijakan Kartu Indonesia Pintar merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi karena masih banyak ditemukan kasus siswa yang masih usia sekolah namun putus sekolah karena kesulitan biaya.

Fenomena yang terjadi salah satunya adalah masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerima dana KIP serta masih adanya siswa yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima dana KIP. Padahal seharusnya pemerintah meluncurkan program ini adalah diperuntukkan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin agar mendapat kesempatan pendidikan yang sama. Fungsi dari dana KIP adalah pembelian buku dan alat tulis sekolah, pembelian pakaian/seragam dan alat perlengkapan sekolah (tas, sepatu, dll), biaya transportasi ke sekolah, uang saku siswa/ iuran bulanan siswa, biaya kursus/les tambahan, keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan di sekolah/madrasah.

Masalah lain yang terjadi adalah sulitnya pengawasan yang dilakukan, hal ini dikarenakan mekanisme penyaluran dana yang langsung ditransfer ke rekening siswa. Dana tersebut yang mengelola adalah orang tua siswa dan pihak sekolah hanya sebagai implementor sulit mengawasi penggunaan dana tersebut. Pada saat penerimaan dana KIP orang tua siswa tidak dapat mengelolanya dengan baik sehingga, dana KIP menjadi tidak tepat sasaran karena digunakan untuk keperluan pribadi bukan sebagai keperluan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian ini adalah kualitatif karena untuk mengetahui proses implementasi kebijakan. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

Subyek Penelitian

Subyek pada penelitian ini adalah Staff Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang mengurus Kartu Indonesia Pintar, Kepala Sekolah, 4 siswa penerima Kartu Indonesia Pintar

(KIP), serta 4 orangtua siswa penerima KIP.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu SMP di Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul yaitu SMP N 1 Semin. Alasan pemilihan sekolah tersebut adalah karena penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMP N 1 Semin tahun 2015/ 2016 ini cukup banyak yakni 161 siswa.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya; pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subyek peneliti, hidup pada saat itu, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan anutan para subyek pada keadaan waktu itu. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Moleong, 2009: 186). Studi dokumen untuk memperoleh data tentang hasil laporan kegiatan program pendukung

aplikasi instrumentasi yang telah dilakukan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi : *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* (*verification* dan penarikan kesimpulan) (Sugiyono, 2007: 337-345).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di SMP N 1 Semin tahun ajaran 2015/ 2016
Penerima Kartu Indonesia Pintar adalah siswa yang berasal dari keluarga yang memang dalam hal pembiayaan pendidikan masih dalam taraf kurang terpenuhi. Dengan adanya Kartu Indonesia Pintar diharapkan untuk bisa mensejahterakan siswa agar dapat berkembang seperti halnya dalam

kekurangan uang saku maka siswa dapat terpenuhi uang sakunya dan kekurangan pada alat sekolah juga dapat terpenuhi. Pengalokasian dana Kartu Indonesia Pintar ditujukan untuk membiayai pendidikan anak dari keluarga miskin atau kurang mampu agar mereka mampu bersekolah layak sama seperti anak lainnya. Kegunaan dana tersebut untuk membeli seragam sekolah, alat tulis, uang saku, dan transportasi siswa pergi ke sekolah.

2. Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam upaya Pemerataan Pendidikan tahun pelajaran 2015/ 2016

Siswa yang diseleksi dari sekolah berdasarkan kepemilikan dari Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang lebih diprioritaskan untuk menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar. Pada tahapan ini biasanya hanya siswa yang memiliki KPS saja yang diajukan untuk menerima KIP. Penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar yang berasal dari SMP N 1 Semin ini dapat dikatakan layak menerimanya, karena melihat dari hasil penelitian dari peneliti yaitu kondisi pekerjaan orang tua mereka dan tempat tinggalnya masih kurang sejahtera. Tempat tinggal mereka yang dapat dikatakan jauh dari jarak rumah ke sekolah juga

menandakan bahwa bantuan KIP sudah tepat sasaran.

Faktor pendukung

Informasi dari pihak dinas secara rutin ke sekolah dan secara online, Dapodik digunakan pemerintah sebagai salah satu indikator penentuan sasaran penerima KIP, adanya rasa saling percaya antara pihak sekolah dengan siswa beserta orang tua terhadap penggunaan dana KIP, siswa menjadi lebih aktif karena peralatan sekolah dapat terpenuhi.

Faktor penghambat

Evaluasi program KIP yang dilaksanakan pada setiap periode program menyebabkan terjadinya perubahan khususnya pada mekanismenya, Penyelewengan dana KIP, kesulitan mengumpulkan kuitansi atau bukti penggunaan dana KIP.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa siswa penerima bantuan KIP di SMP N 1 Semin berjumlah 161 siswa yang seluruhnya memiliki KIP. Siswa yang menerima bantuan KIP telah memenuhi satu kriteria dari berbagai kriteria yang telah ditentukan. Kepemilikan KIP sangat

mendukung pemerataan pendidikan, hal ini ditandai dengan keadaan dan kondisi keluarga siswa yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial.

Mekanisme pelaksanaannya ialah sekolah mengirimkan data ke Dinas Pendidikan untuk diteruskan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Proses selanjutnya, yaitu mengundang siswa penerima KIP untuk diberikan informasi mengenai hal terkait. Perlu diketahui bahwa sekolah juga dapat mengusulkan nama siswa lain yang di luar kepemilikan KIP untuk turut serta diusulkan sebagai calon penerima KIP dengan sesuai kriteria sasaran yang ditetapkan. Faktor pendukung implementasi KIP: informasi dari pihak dinas secara rutin ke sekolah dan secara online, Dapodik digunakan pemerintah sebagai salah satu indikator penentuan sasaran penerima KIP, adanya rasa saling percaya antara pihak sekolah dengan siswa beserta orang tua terhadap penggunaan dana KIP, siswa menjadi lebih aktif karena peralatan sekolah dapat terpenuhi. Faktor penghambat: evaluasi program KIP yang dilaksanakan pada setiap periode program menyebabkan terjadinya perubahan khususnya pada mekanismenya, Penyelewengan dana KIP, kesulitan mengumpulkan kuitansi atau bukti penggunaan dana KIP.

SARAN

Berdasarkan pada penelitian dan beragam informasi yang telah diperoleh, maka dari hasil kajian penelitian mengenai implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP), peneliti memiliki beberapa saran, yaitu:

1. Bagi pemerintah, diharapkan mekanisme yang berubah disetiap periodenya diikuti dengan sosialisasi yang jelas agar semua pihak dapat melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, pemerintah seharusnya membentuk tim monitoring Kartu Indonesia Pintar (KIP), karena menurut hasil dari wawancara peneliti menjelaskan bahwa dari pihak sekolah maupun dinas tidak ada monitoring. Kemudian pemerintah hendaknya lebih memberikan kewenangan yang luas kepada pihak sekolah agar turut berperan aktif dalam mengambil keputusan kebijakan Kartu Indonesia Pintar.
2. Bagi sekolah
Mengenai isu peningkatan mutu, diharapkan sekolah dapat melakukan pembinaan bagi siswa penerima KIP dengan intensif agar siswa penerima KIP juga mampu bersaing, sehingga secara tidak langsung kondisi tersebut membantu meningkatkan mutu pendidikan siswa tersebut. Sekolah juga diharapkan dalam memberikan dana

KIP tidak hanya siswa saja yang menerima, namun juga turut mengundang orang tua siswa agar dapat menyaksikan bahwa anak mereka mendapatkan dana KIP. Meskipun sekolah sudah percaya dengan siswa, namun alangkah lebih baik apabila orang tua juga turut diundang.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi Supeno (1999). *Pendidikan dalam Belenggu Kekuasaan*. Magelang: Pustaka Paramedia.
- Lexy J. Moleong. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugraheni Sukarno. (2013). Implementasi Kebijakan Sekolah Dalam Perubahan Kurikulum (Kurikulum Periode 1994, 2004, 2006 & 2013) Di SMA N 2 Wates Kulon Progo Yogyakarta. SKRIPSI. UNY.
- Muhammad Saroni. (2013). *Pendidikan untuk Orang Miskin Membuka Kerann Keadilan dalam Kesempatan Berpendidikan*. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media.
- Subarsono. (2008). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2007). *Metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R& D*. Bandung: Alfabeta.